

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DI SMAN 15 LUWU

Sumarti Rante Tabang Tamben
191120238

Program Studi Manajemen
Universitas Muhammadiyah Palopo

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah pada SMA Negeri 15 Luwu Tahun Ajaran 2018-2019. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 15 Luwu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah menengah atas negeri pada SMA Negeri 15 Luwu sudah hampir sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dan dasar hukum Pengadaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Perubahan Nomor 35 Tahun 2011.

Kata kunci: sistem pengelolaan keuangan, prosedur pengelolaan keuangan.

ABSTRACT

This study aims to determine the system and procedures for managing school finances at SMA Negeri 15 Luwu for the 2018-2019 academic year. This research was conducted at SMA Negeri 15 Luwu. This study used descriptive qualitative method. The test results show that the implementation of the system and procedures for managing the financial management of public high schools at SMA Negeri 15 Luwu is almost in accordance with the guidelines for the implementation of the Minister of National Education Number 19 of 2007 and the legal basis for the Procurement of Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Procurement of Government Goods/Services with Amendment Number 35 of 2011.

Keywords: *financial management system, financial management procedures*

LATAR BELAKANG

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 31 ayat 4 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya

20 persen. Untuk itu sekurang-kurangnya 20 persen anggaran pendidikan bisa kita peroleh dari anggaran pendapatan belanja negara serta sumber dana. Berbagai

anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Tujuan pendidikan nasional pasal 3 undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 yakni: Berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas menurut PP 19 tahun 2005 Pasal 26 ayat 2 adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 tahun 2005 tentang Bagan Perkiraan Standar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) merupakan salah satu bentuk penyelenggara pendidikan sekolah tingkat menengah di Indonesia. Aturan mengenai pelaporan keuangan sekolah menegaskan keharusan pengelolaan keuangan sekolah, serta pertanggung jawaban atas pengelolaan dana pendidikan baik kepada pemerintah (akuntabilitas vertikal) maupun kepada masyarakat (akuntabilitas horizontal) di mana dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian pada SMA Negeri 15 Luwu. Wushe (2014) pada

lembaga pendidikan, jika manajemen keuangan kurang baik maka akan menimbulkan masalah, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik.

SMA Negeri 15 Luwu merupakan SMA Negeri yang didirikan pada tahun 2007 dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 40314201 yang beralamatkan di Jln. Poros Palopo-Belopa Km. 28 Kelurahan Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Dengan jumlah guru dan staff yang di SMA 15 sebanyak 40 orang dengan total peserta didik sebanyak 503 orang.

Pada tahun 2009 pernah dilakukan peneliti mengenai Pengelolaan Keuangan Sekolah di Kendal tempatnya di Universitas Diponegoro Semarang, Penelitian dilakukan oleh Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Universitas Diponegoro Magister Akuntansi yang bernama Sutedjo dengan Judul Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka

Kabupaten Kendal).

Selain itu, pada tahun 2011 masih ada beberapa penelitian lain tentang Pengelolaan Keuangan Sekolah di Padang tepatnya di Politeknik Negeri Padang, Penelitian dilakukan oleh Mahasiswa jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang yang bernama Ulfi Maryati, Zahara dengan Judul Analisis Komparatif Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK N) di kota Padang (Studi Kasus pada 4 SMAN dan 4 SMKN). Penelitian-penelitian tersebut di atas dilakukan pada lembaga pendidikan seperti Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Implementasi Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan SMA Negeri 15 Luwu tahun ajaran 2018-2019”.

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan sekolah pada SMA Negeri 15 Luwu Tahun Ajaran 2018-2019?

2. Bagaimana penyusunan anggaran keuangan sekolah yang berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 pada SMA Negeri 15 Luwu Tahun

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah pada SMA Negeri 15 Luwu Tahun Ajaran 2018-2019.
2. Untuk mengetahui penyusunan anggaran keuangan sekolah yang berdasarkan Permendiknas Nomor 19

MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran agar dapat menambah pengetahuan dalam mata kuliah Sistem informasi Akuntansi, Sistem Informasi Manajemen, Manajemen Keuangan Daerah, dan Komputer

Ajaran 2018-2019?

3. Sejauh mana Kepatuhan Penyusunan dan Realisasi Anggaran Keuangan Sekolah (RAKS) terhadap Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 pada SMA Negeri 15 Luwu Tahun Ajaran 2018-2019?

Tahun 2007 pada SMA Negeri 15 Luwu Tahun Ajaran 2018-2019

3. Untuk mengetahui sejauh mana Kepatuhan Penyusunan dan Realisasi Anggaran Keuangan Sekolah (RAKS) terhadap Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 pada SMA Negeri 15 Luwu Tahun Ajaran 2018-2019.

Akuntansi tentang sistem dan prosedur pngelolaan keuangan sekolah.

2. Dapat member masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai landasan untuk pengadaan penelitian lebih lanjut.

Manfaat Praktis

- a) Bagi Sekolah

Penelitian ini kiranya bisa dijadikan masukan bagi SMA Negeri 15 Luwu khususnya tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah kaitanya dengan realisasi anggaran keuangan sekolah.

RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penulis memfokuskan penelitian seperti dibawah ini :

- 1 Menentukan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah pada SMA Negeri 15 Luwu Tahun Ajaran 2018-2019.
- 2 Menentukan penyusunan anggaran keuangan sekolah yang berdasarkan

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Dan Prosedur Keuangan

Menurut Nugroho (2015) “sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output.” Dari definisi diatas dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem tersebut:

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur.
2. Unsur-unsur tersebut merupakan

b) Bagi Penulis

Salah satu manfaat penting bagi penulis adalah penelitian ini menghantarkan penulis pada gelar sarjana.

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 pada SMA Negeri 15 Luwu Tahun Ajaran 2018-2019

- 3 Menentukan sejauh mana Kepatuhan Penyusunan dan Realisasi Anggaran Keuangan Sekolah (RAKS) terhadap Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 pada SMA Negeri 15 Luwu Tahun Ajaran 2018-2019.

bagian terpadu sistem yang bersangkutan.

3. Unsur sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem.

Menurut Cote (1994: 3) “Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang

seragam terhadap transaksi-transaksi

Manajemen Keuangan Sektor Pendidikan

Menurut Qomar (2007: 163) keuangan adalah segalanya dalam memajukan suatu lembaga pendidikan. Tanpa dukungan finansial yang cukup, manajer lembaga pendidikan tidak bisa berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang di pimpinnya. Dalam undang-undang Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003 pasal 46 ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 49 ayat 3 juga dinyatakan bahwa dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hermino, fungsi manajemen keuangan pendidikan memiliki makna yang lebih luas yakni: menyediakan informasi kuantitatif yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni:

peusahaan yang sering terjadi”.

1. Kepala sekolah; data keuangan sekolah akan dijadikan sebagai landasan kepala sekolah untuk menyusun rencana sekolah, mengevaluasi kemajuan serta melakukan upaya korektif yang diperlukan,
2. Guru dan Karyawan sekolah; data keuangan sekolah berguna sebagai acuan untuk mengetahui kemampuan sekolah dalam memberikan imbal jasa, manfaat pension dan peluang kerja,
3. Kreditur, sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditur untuk mengetahui apakah pinjaman beserta bunganya dapat di bayar manakala jatuh tempo,
4. Orang tua siswa; bermanfaat bagi orang tua siswa untuk mengetahui kelangsungan hidup sekolah perjanjian jangka panjang sekolah dan tingkat ketergantungan sekolah,
5. Pemasok (*supplier*). Sebagai bahan informasi untuk mengetahui kemungkinan jumlah utang yang dimiliki sekolah pada saat jatuh tempo,
6. Pemerintah; untuk mengatur aktivitas sekolah dan menetapkan anggaran untuk tahun berikutnya,

7. Masyarakat. Membantu masyarakat dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan keuangan sekolah serta rangkaian aktivitas sekolah.

Pelaporan Keuangan

Suwardjono (2012: 101) mengemukakan bahwa “Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara”. Sedangkan Financial Accounting Standards Board (FASB) mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang disampaikan melalui statemen keuangan.

Adapun tujuan dari pelaporan keuangan menurut FASB yang dikutip dalam bukunya Suwardjono (2011: 157) antara lain:

1. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan investasi, kredit

dan semacamnya yang rasional.

2. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai jumlah, saat terjadi dan ketidakpastian penerimaan kas mendatang dari dividen atau bunga dan pemerolehan kas mendatang dari penjualan, penebusan, atau jatuh temponya sekuritas atau pinjaman.

Pengelolaan Keuangan Sekolah

Menurut Halim (2007: 44) menyatakan adanya akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan iterhadap peraturan perundang-undangan. Halim (2007) menyatakan bahwa instrument utama akuntabilitas finansial adalah anggaran pemerintah, data keuangan publik yang dipublikasikan secara periodik, laporan-laporan tahunan, dan laporan-laporan pemeriksaan dan laporan lainnya yang disusun oleh badan-badan independen.

Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh standar-standar pengelolaan, kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005).

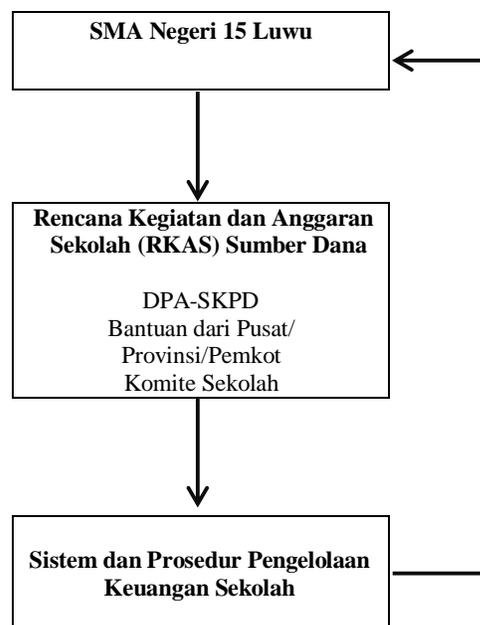
Standar pengelolaan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah standar pengelolaan pendidikan untuk sekolah/madrasah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005).

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005).

Rencana kerja sekolah adalah salah satu komponen dari perencanaan program

sekolah. Rencana kerja sekolah menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu sebagai dasar pengelolaan sekolah dalam mendukung peningkatan mutu lulusan (Lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bagian A 4).

Kerangka Penelitian



METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif sering digunakan untuk menggambarkan fenomena atau kejadian dan keadaan, dalam penelitian penulis berupaya untuk menganalisis implementasi system dan

pengelolaan keuangan di SMAN 15 Luwu dengan standar Peraturan Pemerintah N0 19 tahun 2007.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMAN 15 Luwu Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan kemudahan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, bagi penulis cocok menjadi objek penelitian mengenai implementasi system dan pengelolaan keuangan. Sedangkan waktu penelitian dilakukan yaitu pada 24 Maret 2021 sampai dengan 24 April 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ada beberapa cara yang dilakukan yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Keabsahan Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemandapan dan kebenarannya. Peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang paling tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Validitas merupakan jaminan bagi kemandapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian. Cara paling

umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif bagi peningkatan validitas adalah triangulasi.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sutopo, 2006).

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini menggunakan pola penelitian induktif yang diolah dengan teknik saling terjalin atau interaktif mengalir. Proses analisis data dengan model interaktif meliputi empat komponen yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Temuan Penelitian

Dari hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan adanya persamaan dengan kajian teori yang penelitian jabarkan sebelumnya yaitu tentang akuntansi sektor pendidikan yang berpengaruh terhadap implementasi Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah yang bisa dipilih dan disesuaikan dengan keadaan sekolah. Dengan adanya Akuntansi sektor pendidikan yang memberikan pengaruh terhadap implementasi sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah yang menggambarkan arti pentingnya informasi keuangan sebagai dasar mengambil keputusan oleh SMA 15 Luwu. Untuk mengetahui bagaimana informasi keuangan yang diperlukan untuk kepentingan sendiri (internal) sebagai idasar perencanaan dan pengelolaan keuangan oleh bendahara. Sedangkan untuk kepala sekolah, di samping untuk kepentingan sendiri, informasi juga diperlukan oleh pihak lain yang berkepentingan sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban. Dengan demikian iakuntansi pendidikan implementasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah yang dipilih oleh SMA Negeri 15 Luwu ada 3 yaitu :

1. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil
2. Memproses atau menganalisis data yang relevan

3. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

Memenuhi standar pengelolaan yang diperkaya dengan standar pengelolaan selolah di negara maju, maka pembiayaan dalam hal ini biaya penyelenggaraan SBI memenuhi standar pembiayaan pendidikan dan menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Sesuai dengan kewenangannya yang berhubungan dengan kewajiban membiayai penyelenggaran pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat ikut serta di dalam proses sistem dan prosedur rencana kegiatan dan anggran sekolah yang dananya akan di alokasikan untuk program pendidikan siswa dalam kaitanya meningkatkan fasilitas dan rasa nyaman siswa dalam belajar. Didasarkan pada RPS/RKS dan RKAS yang dapat dilakukan dalam melakukan biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan biaya iSBI. Untuk mengetahui RKAS atau RAKS maka antar input dengan output saling

memiliki keterkaitan yang berhubungan dengan uang masuk yang berapa inominalnya bisa kita bandingkan dengan berapa jumlah program-program yang kita simpulkan dalam anggaran program tersebut dan berdasarkan berapa uang masuk dan kita sertakan dengan program tersebut.

Pertanggung Jawaban Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah

Dasar dari bentuk pertanggung jawaban sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah, maka bisa kita lihat dengan berapa besar nominal anggaran pengeluaran uang yang berdasarkan RKAS. Sementara RKAS awal dibuat berdasarkan masing-masing lini atau bagian yang di susun sesuai dengan program dan prosedur kerja yang menjadi pedoman pengeluaran keuangan sekolah. Untuk itu yang berkaitan dengan program maka sumber bertanggung jawaban pengelolaan keuangan sekolah bisa dilakukan dengan pengeluaran yang misalnya pengeluaran fisik sebesar 25%, ATK 5 %, dan bahan mengajar 25%. Itu semua yang menjadi pengeluaran keuangan sekolah yang berdasarkan rencana kegiatan dan

anggaran sekolah.

Data yang pendukung untuk penggunaan anggaran oleh pihak sekolah seperti nota atau kwitansi penggunaan anggaran tidak dapat diperlihatkan oleh pihak sekolah. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber.

“...*tabe* untuk nota dan kwitansi itu tidak bisa *dikasi liat* sembarang orang karena itu rahasia sekolah...”

Sumber: Wawancara dengan Kepala Sejalan SMAN 15 Luwu

Berdasarkan wawancara diatas maka data pendukung untuk realisasi anggaran tidak dapat diperlihatkan karena pihak sekolah sangat melindungi data pengeluaran mereka.

Sasaran dan Hasil Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

Pada dasarnya rencana kegiatan ini 80 % berhasil dan ketidak berhasilannya terdapat pada kendala yaitu ada beberapa siswa yang tidak lunas membayar sampai 1 tahun. Sehingga di dalam sistem pengelolaan keuangan sekolah yang orang tua siswa benar-benar tidak mampu dan mengajukan keringanan pasti diberi untuk itu 100% membayar kemungkinan

sangatlah berkurang dari pengeluaran fasilitas kegiatan sekolah yang sudah sesuai dengan rencana. Bagi komite sekolah kekurangan keberhasilan terletak pada pembayaran BOSP tiap awal masuk ajaran sekolah setelah itu tata kelola keuangan sudah sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah.

Melihat dari hasil bisa kita lihat dalam anggaran komite sekolah yang belum kesemuanya siswa membayar keuangan sekolah secara rutin, maka ada sedikit kendala di dalam sistem berjalannya peningkatan fasilitas dan proses pembelajaran yang data tersebut berasal dari dana masyarakat atau orang tua siswa. Sebagai sekolah yang bertaraf Internasional bisa kita lihat bagaimana manajemen mutu yang dilakukan agar output dengan input sumber daya siswa dalam proses pembelajaran bisa lebih nyaman dan tenang dalam mendapatkan fasilitas yang diterapkan sudah lengkap untuk diterapkan di lingkungan SMA Negeri 15 Luwu.

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan SMA Negeri 15 Luwu

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang sudah dipolah sesuai

dengan kumpulan-kumpulan program-program yang dimiliki oleh Sekolah secara keseluruhan. Sehingga kita bisa mengetahui berapa besar uang masuk dan kita sesuaikan dengan program-program yang memiliki program. Untuk itu bisa kita ketahui berapa besar program yang diperoleh dalam program-program tersebut, maka program tersebut memiliki plafon anggaran yang bisa kita kumpulkan kedalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang sekarang menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sehingga di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang menyetujui program ini berlangsung adalah kepala sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, dan ketua komite sekolah.

Permohonan Pengesahan RKAS digunakan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan mengetahui Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Luwu.

Setelah RKAS dibuat maka rencana selanjutnya adalah pembelian barang yang sesuai dengan rencana yang ditentukan oleh rencana kegiatan dan

anggaran isekolah. Untuk itu pembelian barang juga berdasarkan pada kumpulan program yang memiliki program tersebut.

Setelah membuat RKAS maka langkah selanjutnya adalah pembelian barang, maka dari itu proses selanjutnya adalah pembuatan surat pertanggung jawaban yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan mengetahui kepala sekolah dan persetujuan anggaran dan pendapatan belanja sekolah dengan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dana Bos

Penggunaan Dana BOS umumnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan siswa karena tolak ukur pemberian dana BOS adalah jumlah siswa. Namun dalam penggunaan dan pengelolaan dana BOS tidak dapat di publis dikarenakan ada beberapa data yang bersifat privasi yang tidak dapat diberikan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan narasumber :

“...untuk penggunaan dan pengelolaan dana BOS kami tidak bisa berikan karena itu *e...* ada data yang bersifat rahasia. Sama *ji* dengan penggunaan anggaran sekolah juga, tidak bisa *dikasi* sembarang orang...”

Sumber: Wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 15 Luwu

Untuk data rinci tentang penggunaan dan pengelolaan dana BOS tidak dapat diakses secara maksimal karena pihak sekolah sangat menjaga kerahasiaan penggunaan anggaran mereka.

Namun, menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Luwu pengelolaan dan alur penggunaan dana BOS di SMA Negeri 15 Luwu sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

“... penggunaan dana bos sudah sesuai dengan fungsinya, kalau alur penggunaannya sama *ji* sama semua sekolah, pertama pemerintah mentransfer dana ke rekening sekolah. Nanti setelah ada di rekening sekolah itu (dana BOS) baru kepala sekolah rapat dengan guru dan staff...”

Dalam penggunaannya pihak sekolah belum dapat menentukan sampai dana BOS ini ada dalam rekening sekolah. Hal ini dikarenakan sistem pemberian dana BOS dari Kementrian memang mengacu pada jumlah siswa yang dimiliki sebuah sekolah. Sehingga pihak sekolah juga tidak dapat Menyusun

penggunaan anggaran dan sebagainya sebelum mereka mengetahui nominal bantuan yang diberikan.

Pengendalian Anggaran Keuangan SMA Negeri 15 Luwu

Pengendalian anggaran keuangan kecil yang berasal dari keuangan komite sekolah berhubungan langsung dengan bendahara keuangan sekolah. Untuk itu proses ianggaran keuangan kecil sangat memiliki pengaruh di dalam pengendalian keuangan yang berasal dari bendahara dan yang bertanggung jawab penuh adalah bendahara sekolah dan mengetahui komite sekolah.

Pengendalian anggaran keuangan besar yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah semuanya berhubungan langsung dengan sistem dan prosedur beranggung jawaban yang diberikan oleh masing0masing lini/bagian yang memiliki program terutama pada pengendalian yang diberikan oleh WKS per bagian program dan mengetahui kepala sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah diikut sertakan dalam kaitanya dengan anggaran keuangan sekolah yang besar dan bertugas untuk meneliti kembali

realisasi anggaran yang dilaksanakan, apakah anggaran tersebut sudah sesuai dengan RKAS atautkah masih ada RKASP dalam penelitian anggaran yang sudah di alokasikan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah menengah atas negeri pada SMA Negeri 15 Luwu sudah hampir sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dan dasar hukum Pengadaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa iPemerintah dengan Perubahan Nomor 35 Tahun 2011.
2. Sistem pengelolaan dan penggunaan anggaran di SMA Negeri 15 Luwu menurut hasil penelitian sudah cukup bagus dan tersistematis. Hal ini terbukti dengan cukup sulitnya peneliti untuk mendapatkan beberapa data berupa bukti transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Namun tingkat kewaspadaan yang berlebihan dapat menimbulkan opini publik yang berlebihan karena seolah ada data yang ditutupi.

3. Kepatuhan Penyusunan dan Realisasi Anggaran Keuangan Sekolah (RAKS) terhadap Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 di SMA Negeri 15 Luwu Tahun Ajaran 2018-2019 cukup tinggi hal ini terlihat dari diadakannya rapat dalam penyusunan RAKS secara rutin, serta pihak sekolah selalu berpedoman pada pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Kebijakan lokal hanya diambil apabila terdapat kondisi khusus dan sangat mendesak saja.

Saran

Bagi Pihak Sekolah

1. Pihak sekolah hendaknya lebih meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan
2. Bendahara sekolah hendaknya mengikuti seminar atau pelatihan-pelatihan, dan diklat yang tidak hanya diselenggarakan oleh intern sekolah maupun pihak eksternal dari pemerintah daerah/kota untuk

meningkatkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah yang sesuai dengan dasar hukum pemerintah pusat.

Bagi Pemerintah

1. Pemerintah hendaknya memberikan dukungan bagi sekolah tidak hanya dukungan material saja tetapi juga dukungan moral.
2. Pemerintah hendaknya lebih memberikan perhatian terhadap sekolah-sekolah yang tingkat perkembangan sumber dayanya tertinggal dengan memberikan pelatihan-pelatihan ataupun diklat.
3. Pemerintah hendaknya mampu memberikan solusi bagi sekolah-sekolah yang kesulitan dalam mendapatkan murid didik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah”, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat
- Ananda Setiawan. 2017. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Pancasila 1 Wonogiri. Prosiding seminar pendidikan ekonomi dan bisnis. Vol.3, No.1
- Anatasia Anggarkusuma Arofa, Fanni Rahmawati. 2017. Tata kelola

- Keuangan pada sekolah Menengah Kejuruan (studi pada SMK Bina Mansiri Jakarta. Prosiding seminar pendidikan ekonomi dan bisnis. Vol.3, No.1
- Andika puspitasari. 2017. Pengelolaan keuangan sekolah dan upaya perbaikan sistem manajemen keuangan di TK gaya baru III Brebes.
- Arwildayanto dkk, Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan: Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) Akselerasi Pemerataan dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan di Provinsi Gorontalo (Padjadjaran: Widya, 2017)
- Bastian, I. (2006). Akuntansi Pendidikan: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Erlangga.
- Dr. Zaki Baridwan. Sistem Akuntansi-Penyusunan Prosedur dan Metode. Yogyakarta: BPFE. 1994
- Hermiono Agustinus, Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan: Tinjauan perilaku organisasi menuju Comprehensive Multilevel Planning (Jakarta: Gramedia, 2013)
- Iskandar Jamaluddin. 2019. Implementasi Sistem Majaemen Keunagn Pendidikan. Jurnal Idaarah Vo. 3, No. 1
- Kartikasari Intan, Sri Witurachmi. 2015. Implementasi Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Kota Surakarta. Prosiding.
- Karyatun Subur. 2016. Mengelola Keuangan Sekolah. Jurnal Ilmu dan Budaya. Vol.40, No.54
- Khomaria Nur (2018). Penelitian Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan. Jurnal AIAfkar. Vo.6, No.1
- Meli Haryati Rekasari. 2020. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Study Evaluatif Di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan). Jurnal manajer Pendidikan. Vol. 14, No.2
- Meyranti iloe lestari. 2019. Sistem Pengelolaan Keuangan Program Pendidikan Gratis Di Pesantren. JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan). Vol. 3, No.3
- Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam (Jakarta: Erlangga, 2007)
- A gustinus Hermiono, Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan:

- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat
- Nurita Wulansari, Bambang Eka Purnama, dan Indah Uly Wardati. 2013. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pgr 1 Pacitan. *Journal on Networking and Security*.
- Nurul Hariswati. 2015. Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bos. *Ekonomika-Bisnis* Vol. 6 No.1
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
- Rahma Nur. 2016. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan. *Journal Of Islamic Education Management*. Vo.1, No.1
- Sri Setiawati. 2019. Evaluasi Prosedur Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Menilai Efektifitas Dan Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Aula Di Depok. *Jurnal Lentera Akuntansi*. Vol. 4. No.2
- Suardi, Suprpti, Danang. 2020. Manajemen Pengolahan Data Administrasi Keuangan Sekolah Menggunakan Metode Grouded Rsearch. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 13. No.2
- Sutabri, Tata. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta. Andi Offset. 2005
- Sutedjo. (2009). Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal). Tesis: Program Studi Magister Akuntansi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS
- Swardjono. 2012. teori akuntansi perekayasaan pelaporan keuangan. Edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA

Tinjauan perilaku organisasi menuju
Comprehensive Multilevel
Planning (Jakarta: Gramedia,
2013), h. 186

Ulfi Maryati, Zahara. (2011). Analisis
Komparatif Pengelolaan
Keuangan Sekolah Menengah
Atas Negeri (SMA N) dan
Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri (SMK N) di kota

Padang (Studi Kasus pada 4
SMAN dan 4 SMKN).
Jurusan Akuntansi dan
Manajemen Padang.

Undang-undang Dasar Republik
Indonesia 1945 Pasal 31 ayat 4

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional